



KRASAN DI RUMAH: INISIASI KOLABORATIF INKLUSIF DALAM MENEKAN JUMLAH ANAK JALANAN DI KOTA SEMARANG

Kinta Risa Asyifa¹, Irfan Uluputty²

¹ Inspektorat Kota Mojokerto

² Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Corresponding author: irfanuluputty@gmail.com

Received: 27-11-2025, Accepted: 22-12-2025; Published Online: 31-12-2025

ABSTRAK

Fenomena anak jalanan di Kota Semarang mencerminkan kegagalan sistemik pemenuhan hak dasar anak, sementara program multisektor yang tersedia masih belum efektif akibat lemahnya koordinasi dan fragmentasi kebijakan. Penelitian ini menawarkan novelty dengan menelaah bagaimana kolaborasi lintas sektor melibatkan Satpol PP, yayasan sosial dan masyarakat, untuk menghasilkan kampanye publik KRASAN di Rumah, sebuah intervensi berbasis keluarga yang mempromosikan lingkungan domestik aman, komunikatif, dan ramah anak. Menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif dengan analisis tematik, penelitian ini mewawancarai personel Satpol PP, remaja Forum Anak Kota Semarang (FASE), dan perwakilan yayasan yang berkecimpung dalam isu kerentanan anak. Hasil penelitian menegaskan bahwa inisiasi ini sudah berjalan cukup optimal, tercermin dari keberhasilannya membangun ruang kolaborasi yang inklusif serta menyatukan persepsi para aktor terhadap urgensi pencegahan anak jalanan berbasis keluarga. Kampanye KRASAN di Rumah secara operasional mencakup edukasi pengasuhan positif, penguatan komunikasi orang tua dan anak, serta sosialisasi hak anak melalui pertemuan komunitas dan media publik. Temuan menunjukkan bahwa keharmonisan keluarga, dukungan emosional, dan keterlibatan orang tua meningkat setelah kampanye dilakukan, sehingga secara signifikan memperkecil kecenderungan anak meninggalkan rumah. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model tata kelola kolaboratif perlindungan anak yang responsif, berbasis keluarga, dan dapat direplikasi sebagai strategi preventif penurunan angka anak jalanan.

Kata Kunci: Anak Jalanan; Inovasi; Keterbukaan; Kolaborasi; Krasan.

Copyright (c) 2025 Kinta Risa Asyifa, Irfan Uluputty



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International License.

ABSTRACT

The phenomenon of street children in Semarang reflects the failure of the ecosystem that provides basic rights for children, while existing multi-sector programs remain ineffective due to weak coordination and policy fragmentation. This study offers a novel approach by examining how cross-sector collaboration involving the Public Order Agency (Satpol PP), social foundations, and the community led to the KRASAN di Rumah (Home) public campaign, a family-based intervention that promotes a safe, communicative, and child-friendly domestic environment. Using an exploratory qualitative approach with thematic analysis, this study interviewed Satpol PP personnel, the Semarang City Youth and Children Forum (FASE), and representative foundations involved in child vulnerability issues. The results confirm that this initiative has been running quite optimally, reflected in its success in building an inclusive collaborative space and unifying actors' perceptions of the urgency of family-based street child prevention. The KRASAN at Home campaign operationally encompasses positive parenting education, strengthening parent-child communication, and promoting children's rights through community meetings and public media. Findings indicate that family harmony, emotional support, and parental involvement increased after the campaign, significantly reducing the likelihood of children leaving home. This research contributes to the development of a responsive, family-based, and replicable collaborative governance model for child protection as a preventive strategy to reduce the number of street children.

Keywords: *Street Children; Innovation; Openness; Collaboration; Krasan.*

PENDAHULUAN

Akses terhadap hak dasar anak seperti pendidikan, pengasuhan, dan identitas hukum merupakan fondasi utama bagi pembangunan masa depan anak yang terlindungi. Ketiga aspek tersebut tidak hanya bersifat konstitusional, tetapi juga menjadi faktor determinan dalam mencegah eksklusi sosial yang berujung pada fenomena anak jalanan. Ketika hak-hak dasar ini tidak terpenuhi, anak berada pada posisi rentan yang meningkatkan kemungkinan keterputusan dari sistem sosial formal. Kondisi tersebut menegaskan bahwa pemenuhan hak anak merupakan prasyarat fundamental dalam upaya pencegahan anak jalanan (Sulaiman, Abu Bakar Ah, Wahab, Jasni,

& Amat Simin, 2024)

Di antara berbagai faktor pemicu, kualitas pengasuhan keluarga memegang peranan krusial dalam menentukan keberlangsungan anak di lingkungan rumah. Kurangnya pengasuhan berkualitas, yang sering kali dipengaruhi oleh tekanan ekonomi dan rendahnya literasi pengasuhan berbasis hak anak, mendorong anak mencari alternatif ruang sosial di luar rumah. Ketidakmampuan orang tua menyediakan dukungan emosional dan lingkungan aman memperlemah fungsi protektif keluarga. Dalam situasi tersebut, jalanan kerap dipersepsikan anak sebagai ruang yang lebih bebas meskipun sarat risiko (Palmer, Labella, Plowman, Foster, & Masten,

2020)

Kerentanan anak semakin diperparah ketika mereka tidak memiliki identitas hukum yang sah. Ketiadaan akta kelahiran tidak hanya menghambat akses anak terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, tetapi juga meniadakan pengakuan mereka sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan negara. Dampak berlapis ini menempatkan anak pada posisi paling rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan pengabaian. Dengan demikian, identitas hukum menjadi pintu masuk krusial dalam sistem perlindungan anak (Wulczyn et al., 2024)

Merespons kompleksitas tersebut, pendekatan sistemik yang mengintegrasikan layanan pencatatan sipil, penguatan fungsi pengasuhan keluarga, serta akses pendidikan inklusif menjadi strategi preventif yang esensial. Intervensi semacam ini menuntut layanan lintas sektor yang responsif terhadap kebutuhan anak rentan. Pemerintah dan masyarakat perlu memperkuat mekanisme intervensi dini berbasis keluarga. Pemenuhan hak dasar secara komprehensif terbukti meningkatkan kemungkinan anak bertahan dalam lingkungan keluarga (Revenga Becedas, Sant Fruchtmann, Dincu, De Savigny, & Cobos Muñoz, 2022)

Pada tataran global, kesadaran terhadap pentingnya pemenuhan hak anak

telah melahirkan berbagai inisiatif internasional dan kebijakan nasional. Konvensi Hak Anak menjadi landasan normatif yang menempatkan anak sebagai subjek hak yang harus dilindungi. Kerangka kerja lintas sektor yang berkembang mencerminkan pengakuan bahwa persoalan anak bersifat multidimensional. Secara normatif, sistem ini menunjukkan kecenderungan positif dalam penguatan tata kelola perlindungan anak (Kydd, 2003)

Namun demikian, pada level implementasi lokal, program multisektor sering kali tidak berjalan optimal. Lemahnya koordinasi antarinstansi menjadi hambatan utama dalam mewujudkan efektivitas kebijakan. Ketiadaan mekanisme integrasi menyebabkan tumpang tindih program dan inefisiensi sumber daya. Fragmentasi peran antaraktor berkontribusi pada masih banyaknya anak yang berada di luar jangkauan layanan perlindungan (Jabareen & Zlotnick, 2023)

Efektivitas program perlindungan anak juga sangat bergantung pada komitmen politik dan keberpihakan anggaran. Banyak pemerintah daerah belum menempatkan isu anak sebagai prioritas pembangunan strategis. Ketergantungan pada pendekatan sektoral dan karitatif melemahkan sifat transformasional kebijakan perlindungan

anak. Selain itu, keberlanjutan program sering terancam oleh pergantian kepemimpinan dan lemahnya sistem monitoring berbasis bukti (T. L. S. McDonald, S. J. L. Smith, 2023)

Di sisi lain, keterlibatan komunitas dalam pelaksanaan program perlindungan anak masih relatif terbatas. Partisipasi masyarakat sering kali bersifat formalistik tanpa ruang pengambilan keputusan yang bermakna. Minimnya literasi hak anak di tingkat komunitas memperkuat persepsi bahwa perlindungan anak semata-mata tanggung jawab pemerintah. Absennya pelibatan anak dalam perencanaan turut menyebabkan intervensi kurang sesuai dengan kebutuhan riil mereka. (Child Protection Practitioners, 2024)

Kelemahan lain dalam sistem perlindungan anak terletak pada ketersediaan data yang belum terintegrasi. Ketiadaan basis data lintas sektor menyebabkan kebijakan sering kali tidak berbasis kondisi empiris lapangan. Analisis yang parsial menyulitkan pemetaan risiko dan kebutuhan anak secara komprehensif. Akibatnya, intervensi yang dilakukan kurang responsif dan berdaya guna. (Connell & Crowley, 2023)

Selain aspek struktural, kondisi fisik dan sosial lingkungan tempat tinggal juga berpengaruh signifikan terhadap keberlangsungan anak dalam keluarga.

Lingkungan yang tidak aman dan rawan kekerasan memberi tekanan psikologis yang besar bagi anak. Situasi ini mendorong anak mencari ruang alternatif di luar rumah. Oleh karena itu, keamanan lingkungan harus menjadi prioritas dalam kebijakan perlindungan anak. (National Conference of State Legislatures (NCSL), 2025)

Rumah yang nyaman dan lingkungan sosial yang suportif terbukti mengurangi dorongan anak untuk meninggalkan rumah. Pencegahan primer melalui pemenuhan hak atas hunian layak memperkuat keluarga sebagai unit perlindungan pertama. Hak atas tempat tinggal dan keamanan lingkungan menjadi fondasi penting dalam strategi penanggulangan anak jalanan berkelanjutan. (Tayo Isa, 2025)

Dalam konteks perkotaan, pertumbuhan penduduk yang tinggi berbanding lurus dengan meningkatnya masalah kesejahteraan sosial. Di Kota Semarang, ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan ketersediaan lapangan kerja memicu pengangguran dan kemiskinan. Kondisi ini berdampak langsung pada meningkatnya kerentanan keluarga miskin. Anak menjadi kelompok yang paling terdampak dalam dinamika tersebut. (Pakpahan, 2022).

Data kependudukan menunjukkan bahwa pada tahun 2021 jumlah penduduk

Kota Semarang mencapai 1.687.222 jiwa. Tekanan ekonomi mendorong sebagian orang tua melibatkan anak dalam aktivitas ekonomi informal. Keterbatasan pendidikan dan lingkungan keluarga yang tidak aman mempercepat keterputusan anak dari rumah. Fenomena ini berkontribusi pada meningkatnya jumlah anak jalanan. (Darmaji, 2022)

Tabel 1.

Jumlah Anak Jalanan di Berbagai Kota/Kabupaten di Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	Jumlah
1.	Kota Semarang	400
2.	Kota Pekalongan	200
3.	Kota Tegal	333
4.	Kota Magelang	116
5.	Kota Surakarta	103
6.	Kabupaten Magelang	72
7.	Kabupaten Kebumen	299
8.	Kabupaten Kudus	286
9.	Kabupaten Pemalang	120
10.	Kabupaten Blora	90
11.	Kabupaten Brebes	260
12.	Kabupaten Banyumas	70
13.	Kabupaten Rembang	25
14.	Kabupateng Batang	125

Sumber: (Wulandari Asril, 2017)

Secara empiris, Kota Semarang tercatat sebagai wilayah dengan jumlah anak jalanan tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini kontras dengan capaian Kota Semarang sebagai Kota Layak Anak (KLA) tingkat utama.

Diskrepansi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas kebijakan perlindungan anak di tingkat implementasi. Fakta tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara capaian normatif dan realitas sosial. (Darmawan, 2023)

Meskipun berbagai penelitian telah membahas fenomena anak jalanan dari perspektif kemiskinan struktural, kebijakan sosial, serta efektivitas program penjangkauan dan rehabilitasi, masih terdapat kesenjangan pengetahuan yang signifikan terkait bagaimana kolaborasi lintas sektor dapat bekerja secara preventif pada level keluarga sebagai unit sosial terkecil. Sebagian besar studi terdahulu cenderung menempatkan keluarga sebagai latar belakang masalah atau objek intervensi, bukan sebagai arena kolaboratif yang aktif dan strategis dalam tata kelola perlindungan anak. (Alam & Supriatna, 2025)

Situasi ini menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif lintas sektor dalam menangani isu anak jalanan. Pemerintah daerah melalui Satpol PP tidak lagi semata menjalankan fungsi penegakan ketertiban, tetapi bertransformasi menjadi aktor protektif dalam sistem perlindungan anak. Pergeseran orientasi ini menandai transisi dari pendekatan represif menuju strategi pencegahan berbasis keluarga dan komunitas. (Hamdouch & Nyseth, 2023)

Dalam kerangka kolaboratif tersebut, yayasan sosial memainkan peran strategis sebagai penyedia layanan langsung bagi anak dan keluarga rentan. Kolaborasi antara Satpol PP dan yayasan sosial menjembatani kebijakan pemerintah dengan kebutuhan nyata di tingkat akar rumput. Pendekatan yang humanis dan adaptif memungkinkan intervensi mikro yang lebih kontekstual. Sinergi ini memperkuat daya jangkau sistem perlindungan anak. (Idza, 2023)

Partisipasi masyarakat melengkapi ekosistem perlindungan anak dengan fungsi deteksi dini dan dukungan sosial. Keterlibatan komunitas memperkuat kapasitas keluarga dalam menerapkan pengasuhan positif. Masyarakat berperan sebagai agen perlindungan yang mampu mengurangi stigma dan membangun jejaring solidaritas. Kolaborasi pemerintah, yayasan sosial, dan masyarakat menjadi fondasi ruang aman bagi anak. (Rahmadanita & Nurrahman, 2024)

Pendekatan berbasis hak dalam kebijakan keluarga menjadi landasan normatif bagi penguatan perlindungan anak. Hak partisipasi, perlindungan dari kekerasan, dan pengasuhan positif harus menjadi pijakan utama. Ketiadaan pendekatan ini berkontribusi pada disfungsi keluarga dan meningkatnya risiko anak meninggalkan rumah.

(Hämäläinen, Pihlainen, & Vornanen, 2020)

Implementasi kebijakan keluarga berbasis hak menuntut perubahan paradigma dari pendekatan moralistik menuju penghormatan hak asasi anak. Keluarga diposisikan sebagai ruang utama pemenuhan hak anak. Orientasi kebijakan semacam ini berpotensi menjadi instrumen preventif yang efektif. (Olivier & Thevenon, 2023)

Salah satu bentuk konkret dari pendekatan kolaboratif tersebut diwujudkan melalui inovasi KRASAN di Rumah. KRASAN di Rumah hadir sebagai strategi kampanye berbasis keluarga. Program ini mengintegrasikan pendekatan berbasis hak ke dalam dinamika domestik. Inovasi ini menekankan pentingnya rumah sebagai ruang aman dan nyaman bagi anak.

Kampanye ini mendorong penguatan ikatan emosional dalam keluarga serta internalisasi nilai hak anak dalam interaksi sehari-hari. Keluarga diposisikan sebagai aktor utama pencegahan anak jalanan. Pendekatan ini memperkuat fungsi protektif keluarga secara berkelanjutan.

KRASAN di Rumah juga berfungsi sebagai instrumen komunikasi publik yang kolaboratif. Kampanye ini menyoal perubahan persepsi dan sikap kolektif masyarakat terhadap isu anak jalanan.

Dengan melibatkan berbagai aktor, pesan perlindungan anak disampaikan secara partisipatif.

Efektivitas kampanye terletak pada kemampuannya menyinergikan nilai perlindungan anak dengan partisipasi sosial. Ketika anak jalanan dipahami sebagai tanggung jawab bersama, upaya pencegahan menjadi lebih sistemik. Kampanye ini memperkuat dimensi preventif kebijakan perlindungan anak.

Berangkat dari konteks tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dalam formulasi model kolaborasi lintas sektor yang menempatkan pendekatan berbasis hak pada lingkungan keluarga sebagai inti strategi pencegahan anak jalanan. Perspektif ini berbeda dari pendekatan sebelumnya yang cenderung menitikberatkan pada intervensi struktural atau represif. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan tata kelola perlindungan anak yang kolaboratif, berbasis keluarga, dan berkelanjutan.

KAJIAN TEORI

Fenomena kolaborasi dalam penyelesaian masalah publik mengalami transformasi signifikan dalam dua dekade terakhir, seiring meningkatnya kompleksitas isu sosial yang menuntut keterlibatan aktor lintas sektor secara setara. Dalam konteks ini, collaborative governance berkembang sebagai kerangka

analitis untuk memahami bagaimana pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas dapat bekerja bersama melalui proses deliberatif yang berlandaskan keterbukaan dan kepercayaan. Pendekatan ini menjadi semakin relevan ketika isu yang ditangani melibatkan kelompok rentan, seperti anak, yang membutuhkan tata kelola responsif, inklusif, dan sensitif terhadap dinamika sosial.

Secara konseptual, Ansell dan Gash merumuskan collaborative governance sebagai kerangka yang tersusun atas empat dimensi utama yang saling berkelindan, yakni kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, dan proses kolaborasi. Model ini menempatkan kolaborasi bukan sekadar hubungan koordinatif, melainkan sebagai proses institusional yang menekankan dialog setara, transparansi, dan partisipasi bermakna. Dalam isu sosial yang kompleks, pendekatan ini menjadi alternatif strategis terhadap model hierarkis yang kerap gagal menangkap kedalaman persoalan masyarakat. (Syaiful, 2018).

Tabel 2.
Kerangka Konseptual Penanganan
Anak Jalanan dalam *Collaborative*
Governance

Dimensi	Indikator
Kondisi awal kolaborasi lintas sektor dalam penanganan anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketimpangan sumber daya 2. Insentif institusional dan motivasi organisasi untuk terlibat
Kepemimpinan fasilitatif dalam mengelola kolaborasi lintas sektor penanganan anak jalanan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan pemimpin antarinstansi dalam memfasilitasi komunikasi dan dialog setara antaraktor. 2. Kemampuan pemimpin dalam mengelola perbedaan kepentingan dan konflik secara konstruktif.
Desain kelembagaan kolaboratif dalam penanganan anak jalanan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejelasan prosedur, regulasi, dan mekanisme kerja bersama dalam penanganan anak jalanan. 2. Kejelasan pembagian peran dan struktur koordinasi antarinstansi dan mitra sosial.
Dinamika Proses Kolaborasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat partisipasi inklusif antar instansi, yayasan sosial, dan masyarakat

Dimensi	Indikator
	<ol style="list-style-type: none"> dalam perencanaan dan pelaksanaan program. 2. Intensitas dialog, pembangunan kepercayaan, dan penciptaan pemahaman bersama terkait pencegahan anak jalanan berbasis keluarga.

Sumber: Dimodifikasi dari konsep *Collaborative Governance* oleh (Syaiful, 2018)

Ansell dan Gash menegaskan bahwa kolaborasi berangkat dari kondisi awal yang ditandai oleh saling ketergantungan antaraktor dalam menyelesaikan persoalan yang tidak dapat ditangani secara unilateral. Kondisi awal ini sering kali dibentuk oleh faktor-faktor seperti ketidakpercayaan historis, ketimpangan kekuasaan, serta keterbatasan kapasitas aktor. Faktor-faktor tersebut secara langsung memengaruhi arah dan kualitas kolaborasi yang akan terbangun. Bianchi et al. (2021) menunjukkan bahwa pemetaan kondisi awal menjadi fondasi penting bagi efektivitas desain kelembagaan dan keberlanjutan proses kolaboratif.

Dalam konteks tersebut, kepemimpinan fasilitatif memainkan

peran kunci sebagai penghubung antaraktor yang memiliki kepentingan, sumber daya, dan tingkat kekuasaan yang berbeda. Ansell dan Gash menekankan bahwa pemimpin kolaboratif tidak bertindak secara otoritatif, melainkan berfungsi sebagai fasilitator yang mendorong dialog, menyeimbangkan relasi kekuasaan, serta membangun kepercayaan antaraktor. Kepemimpinan fasilitatif menjadi penentu keberhasilan kolaborasi, terutama dalam isu sosial yang sensitif, karena mampu menjaga inklusivitas proses dan memastikan bahwa kepentingan kelompok rentan tetap terartikulasikan secara adil.

Setelah kondisi awal dan peran kepemimpinan terkelola, desain kelembagaan menjadi elemen krusial yang menentukan stabilitas kolaborasi. Ansell dan Gash menekankan pentingnya aturan main yang jelas, representasi setara, serta prosedur transparan sebagai basis akuntabilitas. Tanpa desain kelembagaan yang responsif, kolaborasi berpotensi terjebak dalam dominasi aktor tertentu dan konflik kepentingan, sebagaimana ditegaskan oleh Jabareen dan Zlotnick (2023).

Dimensi berikutnya adalah proses kolaborasi, yang menurut Ansell dan Gash terdiri atas empat komponen utama: dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan penciptaan

pemahaman bersama. Keempat komponen ini bersifat dinamis dan saling memengaruhi. Dialog menjadi pintu masuk interaksi, kepercayaan berfungsi sebagai pengikat, komitmen menjaga kesinambungan, dan pemahaman bersama mengarahkan tindakan kolektif. Tanpa proses yang intens dan berkelanjutan, kolaborasi berisiko berhenti pada tataran formalitas.

Dialog tatap muka (*face-to-face dialogue*) dipandang sebagai titik awal yang krusial karena memungkinkan aktor membangun pengakuan timbal balik dan mengurangi kesenjangan persepsi. McDonald dan Smith (2023) menunjukkan bahwa dialog terbuka mampu menurunkan resistensi dan menciptakan ruang deliberatif yang lebih inklusif dalam kebijakan perlindungan sosial.

Melalui dialog yang konsisten, proses kolaborasi berkembang menuju trust building. Kepercayaan menjadi fondasi normatif yang memungkinkan pertukaran informasi, menurunkan biaya transaksi, dan meningkatkan prediktabilitas tindakan. Connell dan Crowley (2023) menegaskan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat bergantung pada persepsi integritas dan konsistensi antaraktor, khususnya dalam kebijakan kesejahteraan sosial.

Tahap selanjutnya adalah komitmen terhadap proses kolaboratif, di mana aktor bersedia menginvestasikan sumber daya secara berkelanjutan. Komitmen ini bersifat siklis: semakin kuat hasil kolaboratif, semakin tinggi komitmen untuk melanjutkan proses. Temuan Naeem et al. (2023) menunjukkan bahwa interaksi berulang yang akuntabel menjadi kunci keberlangsungan kolaborasi.

Puncak dari proses kolaboratif adalah terciptanya pemahaman bersama mengenai tujuan, nilai, dan strategi kolektif. Shared understanding memungkinkan kolaborasi bertransformasi dari sekadar interaksi menjadi mekanisme tata kelola yang adaptif dan berorientasi solusi. Pada tahap ini, kolaborasi mulai menghasilkan dampak substantif terhadap kebijakan dan praktik sosial.

Seiring berkembangnya kajian empiris, collaborative governance diaplikasikan dalam berbagai sektor, termasuk perlindungan anak, kesehatan, pendidikan, dan tata kelola komunitas. Weatherill et al. (2024) menunjukkan bahwa pendekatan ini relevan dalam isu perlindungan anak karena menuntut sensitivitas tinggi dan koordinasi multipihak yang berkelanjutan.

Dengan demikian, teori collaborative governance Ansell dan Gash menyediakan kerangka komprehensif

untuk memahami bagaimana aktor lintas sektor membangun kepercayaan, komitmen, dan pemahaman kolektif. Model ini tidak hanya relevan pada level makro organisasi publik, tetapi juga dapat ditransposisi ke konteks mikro seperti keluarga dan komunitas lokal. Dalam konteks penelitian ini, kerangka tersebut memberikan landasan analitis yang kuat untuk menelaah bagaimana intervensi sosial seperti KRASAN di Rumah beroperasi sebagai praktik tata kelola kolaboratif dalam unit sosial terkecil.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain eksploratif untuk menggali secara mendalam dinamika keterbukaan kolaboratif lintas sektor dalam upaya pencegahan anak jalanan melalui kampanye publik KRASAN di Rumah. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami pengalaman, persepsi, dan makna yang dikonstruksi aktor secara kontekstual dalam realitas sosial yang kompleks, khususnya terkait peran lingkungan keluarga sebagai faktor protektif utama bagi anak. (Olawale, Chinagozi, & Joe, 2023)

Penelitian dilaksanakan di Kota Semarang pada periode Desember-Januari 2025, dengan mempertimbangkan kota ini

sebagai lokasi tingginya prevalensi anak jalanan. Informan penelitian berjumlah 8 orang, terdiri atas 3 aparat Satpol PP Kota Semarang yang terlibat langsung, 2 pengelola yayasan sosial Anantaka yang berpengalaman dalam pendampingan anak rentan dan 3 remaja anggota Forum Anak Kota Semarang (FASE) sebagai representasi perspektif anak. Informan dipilih secara *purposive* berdasarkan kriteria inklusi yakni keterlibatan langsung dalam isu perlindungan anak dan pengalaman partisipatif dalam kampanye. Kriteria eksklusi meliputi aktor yang tidak terlibat secara substantif atau hanya bersifat administratif. (Bianchi, Nasi, & Rivenbark, 2021)

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur. Instrumen wawancara dirancang untuk menggali beberapa dimensi utama, meliputi pengalaman keterlibatan dalam kolaborasi lintas sektor, praktik komunikasi dan keterbukaan antaraktor, persepsi mengenai peran keluarga sebagai ruang aman bagi anak, serta penilaian informan terhadap efektivitas kampanye KRASAN di Rumah dalam mencegah anak meninggalkan rumah dan hidup di jalan.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik melalui tahapan *open coding*, *axial*

coding, dan pengembangan tema. Pada tahap *open coding*, data ditranskripsikan dan dikodekan untuk mengidentifikasi unit makna awal. Tahap *axial coding* dilakukan dengan mengelompokkan kode-kode yang memiliki keterkaitan konseptual, sedangkan tahap pengembangan tema bertujuan merumuskan pola tematik utama yang merepresentasikan dinamika kolaborasi dan peran lingkungan keluarga dalam pencegahan anak jalanan. (Naeem, Ozuem, Howell, & Ranfagni, 2023)

Keabsahan dan kredibilitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan memverifikasi informasi yang diperoleh dari aparat Satpol PP, pengelola yayasan sosial, dan remaja FASE. Strategi ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan meminimalkan bias perspektif tunggal dalam analisis temuan.

Aspek etika penelitian dijaga dengan memperoleh persetujuan sadar (*informed consent*) dari seluruh informan, menjamin kerahasiaan identitas, serta memperoleh izin kelembagaan dari instansi terkait. Dengan prosedur metodologis ini, penelitian diharapkan memberikan temuan yang kredibel dan berkontribusi pada pengembangan model kolaboratif perlindungan anak berbasis keluarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Inisiatif KRASAN di Rumah lahir dari kolaborasi strategis antara Satpol PP Kota Semarang, yayasan sosial, dan masyarakat sebagai respons terhadap meningkatnya kerentanan anak jalanan di wilayah perkotaan. Kolaborasi ini menandai pergeseran peran Satpol PP dari aktor penegakan ketertiban semata menuju aktor sosial pendekatan preventif berbasis keluarga. Melalui kampanye KRASAN di Rumah, Satpol PP tidak lagi berfokus pada penjangkauan represif anak jalanan, tetapi mendorong penguatan ruang domestik sebagai fondasi perlindungan anak. Yayasan sosial berperan memperkuat kapasitas keluarga melalui edukasi pengasuhan, konseling berbasis hak anak, serta pendampingan psikososial, sementara masyarakat dilibatkan dalam membangun lingkungan sosial yang lebih suportif dan tidak stigmatis. Sinergi multipihak ini merepresentasikan praktik tata kelola kolaboratif yang mengintegrasikan negara, masyarakat sipil, dan komunitas dalam upaya pencegahan anak jalanan.

Secara operasional, KRASAN di Rumah tidak berhenti pada narasi kampanye, tetapi diwujudkan melalui berbagai aktivitas konkret. Salah satu bentuk utama implementasi program adalah kegiatan sosialisasi dan dialog keluarga yang dilaksanakan pada 18

Januari 2025 di Klub Merby, Kota Semarang, yang melibatkan orang tua dan anak secara bersamaan. Dalam forum ini, orang tua dan anak diberi ruang untuk menyampaikan perspektif masing-masing mengenai kenyamanan rumah, pola komunikasi, serta harapan terhadap relasi keluarga.



Sumber: instagram @anantaka.ct

Gambar 1.
Pertemuan Kampanye Krasan di Rumah

Selain pertemuan tatap muka, kampanye KRASAN di Rumah juga diperkuat melalui media komunikasi publik, seperti talkshow radio dan diskusi daring, yang berfungsi menyebarkan pesan tentang rumah sebagai ruang aman dan ramah anak. Bentuk implementasi ini menunjukkan bahwa KRASAN di Rumah bekerja melalui kombinasi intervensi langsung dan strategi komunikasi sosial yang berkelanjutan.



Sumber: instagram @anantaka.ct

Gambar 2.
Poster Talkshow Kampanye Krasan di Rumah

Penelitian ini berfokus pada bagaimana dinamika keluarga yang terbangun melalui program KRASAN di Rumah mencerminkan prinsip-prinsip utama dalam *collaborative governance* sebagaimana dirumuskan oleh Ansell dan Gash. Temuan empiris menunjukkan bahwa proses kolaboratif tidak hanya berlangsung pada level institusional antarorganisasi, tetapi juga bekerja pada ranah mikro keluarga sebagai unit sosial terkecil. Keluarga menjadi arena kolaborasi yang menentukan karena kualitas relasi interpersonal di dalamnya membentuk fondasi psikososial anak. Ketika relasi orang tua–anak dibangun secara lebih dialogis, aman, dan suportif, kecenderungan anak untuk meninggalkan rumah dan mencari ruang alternatif di jalan dapat ditekan secara signifikan.

Tabel 3.
Matriks Tematik Wawancara

Informan	Tema Utama	Indikator Tematik	Temuan Utama
A1	Lingkungan keluarga yang aman dan nyaman	Komunikasi yang menenangkan	Anak merasa aman karena orang tua berbicara dengan nada tenang dan tidak menggunakan kekerasan verbal.
A2	Lingkungan keluarga yang aman dan nyaman	Pendengaran aktif dan kepekaan emosional	Anak merasa dihargai karena didengarkan ketika sedang mengalami masalah pribadi.
A3	Lingkungan keluarga yang aman dan nyaman	Sikap orang tua yang tidak represif	Anak tidak lagi ingin kabur dari rumah karena sikap orang tua lebih terbuka dan ramah.
A1	Hubungan harmonis antar orang tua	Keharmonisan relasi suami-istri	Anak merasa tenang saat melihat orang tua bekerja sama dan saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari.
A2	Hubungan harmonis antar orang tua	Keteladanan dalam menyelesaikan konflik	Anak mengamati bahwa konflik diselesaikan dengan dialog sehingga memberi contoh yang baik.
A3	Hubungan harmonis antar orang tua	Suasana rumah yang penuh penghargaan dan empati	Keharmonisan orang tua menumbuhkan kedekatan emosional dan rasa nyaman di rumah.

Informan	Tema Utama	Indikator Tematik	Temuan Utama
A1	Dukungan terhadap bakat dan minat anak	Pemberian fasilitas dan pujian atas hasil karya	Anak merasa bangga dan lebih semangat karena hasil karya diapresiasi orang tua.
A2	Dukungan terhadap bakat dan minat anak	Perubahan persepsi orang tua terhadap minat anak	Orang tua mulai mendorong bakat yang semula dianggap tidak penting, seperti menggambar atau menulis.
A3	Dukungan terhadap bakat dan minat anak	Keterlibatan langsung dalam kegiatan anak	Anak merasa disayang ketika orang tua hadir dan memberikan dukungan langsung dalam kegiatan bakatnya.

Hasil analisis tematik sebagaimana dirangkum dalam Matriks Tematik Wawancara menunjukkan tiga tema utama yang konsisten muncul, yakni lingkungan keluarga yang aman dan nyaman, hubungan harmonis antar orang tua, serta dukungan terhadap bakat dan minat anak. Pada tema pertama, perubahan pola komunikasi orang tua menjadi lebih tenang, responsif, dan bebas kekerasan menciptakan rasa aman emosional bagi anak. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan domestik, tetapi juga membuka ruang dialog yang setara antara anak dan orang tua. Pada konteks ini, rumah mulai dipersepsikan

anak sebagai ruang perlindungan, bukan sebagai sumber tekanan.

Tema kedua menunjukkan bahwa keharmonisan relasi antar orang tua berperan penting dalam membangun stabilitas emosional anak. Ketika konflik diselesaikan secara dialogis dan penuh penghargaan, anak memperoleh teladan langsung mengenai cara membangun relasi yang sehat. Pola ini memperkuat kepercayaan anak terhadap lingkungan keluarganya dan mengurangi dorongan untuk mencari pelarian di luar rumah.

Tema dukungan terhadap bakat dan minat anak menegaskan bahwa pemenuhan hak perkembangan anak berfungsi sebagai mekanisme protektif yang signifikan dalam mencegah keterlibatan anak dalam kehidupan jalanan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perubahan sikap orang tua dari sebelumnya abai atau membatasi, menjadi mendukung dan apresiatif, berkontribusi pada meningkatnya rasa dihargai, kepercayaan diri, dan keterikatan emosional anak dengan keluarga. Dukungan konkret berupa pemberian fasilitas, keterlibatan langsung, dan pengakuan atas capaian anak memperkuat rumah sebagai ruang aktualisasi yang aman dan bermakna.

Temuan-temuan empiris tersebut selaras dengan prinsip utama *collaborative governance*, khususnya

pada dimensi dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan pembentukan pemahaman bersama. Pada level mikro keluarga, dialog tatap muka terejawantahkan melalui komunikasi dua arah yang lebih terbuka antara orang tua dan anak. Kepercayaan dibangun melalui konsistensi sikap orang tua yang tidak represif dan penuh empati. Komitmen terhadap proses tercermin dalam keterlibatan aktif orang tua dalam kehidupan anak sehari-hari, sementara pemahaman bersama berkembang melalui kesadaran kolektif bahwa kenyamanan rumah merupakan prasyarat utama perlindungan anak. Dengan demikian, keluarga berfungsi sebagai unit kolaboratif yang menjalankan prinsip tata kelola secara informal namun efektif.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada kemampuannya menunjukkan bahwa *collaborative governance* tidak hanya relevan pada level kebijakan dan organisasi publik, tetapi juga dapat ditransposisikan ke dalam konteks keluarga sebagai ruang mikro kolaborasi. Berbeda dengan pendekatan Satpol PP di banyak daerah lain yang masih menitikberatkan pada penertiban dan rehabilitasi anak jalanan, KRASAN di Rumah menawarkan model preventif berbasis keluarga yang menempatkan Satpol PP sebagai fasilitator kolaborasi

sosial. Model ini memperluas horizon tata kelola perlindungan anak dengan menggeser fokus dari penanganan anak di jalan menuju pencegahan melalui penguatan relasi domestik.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Waktu penelitian yang relatif singkat membatasi kemampuan studi ini untuk menangkap dinamika perubahan relasi keluarga secara longitudinal serta menilai keberlanjutan dampak program KRASAN di Rumah dalam jangka panjang. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan perspektif relasional dan pengalaman subjektif para informan, sehingga belum mengukur dampak kuantitatif program terhadap penurunan jumlah anak jalanan. Keterbatasan tersebut membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk menggunakan desain longitudinal dan menggabungkan pendekatan kualitatif–kuantitatif guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas dan replikasi model KRASAN di Rumah.

PENUTUP

Inovasi KRASAN di Rumah terbukti efektif dalam menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan nyaman, yang menjadi dasar perlindungan anak dari risiko menjadi anak jalanan. Hubungan harmonis antar orang tua

berperan penting dalam membangun stabilitas emosional dan menciptakan pola komunikasi positif di dalam keluarga. Dukungan aktif orang tua terhadap bakat dan minat anak memperkuat kepercayaan diri dan ikatan emosional anak dengan keluarga. Pendekatan *Collaborative Governance* oleh Ansell dan Gash menegaskan pentingnya dialog tatap muka dan pembangunan kepercayaan sebagai fondasi interaksi keluarga yang kolaboratif. Model ini memberikan kontribusi strategis bagi perlindungan anak berbasis keluarga yang berkelanjutan dalam konteks sosial budaya Indonesia.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu dicermati. Durasi penelitian yang relatif terbatas belum memungkinkan penelusuran dinamika perubahan relasi keluarga secara longitudinal maupun pengukuran dampak jangka panjang program terhadap penurunan kerentanan anak jalanan. Selain itu, implementasi KRASAN di Rumah masih menghadapi hambatan berupa jangkauan kampanye yang bergantung pada sosialisasi periodik, belum meratanya literasi pengasuhan berbasis hak anak di seluruh lapisan keluarga, serta ketergantungan pada komitmen aktor kolaborasi yang berpotensi melemah seiring perubahan personel atau prioritas kelembagaan. Keterbatasan ini membuka peluang bagi

penelitian selanjutnya untuk memperpanjang waktu studi, mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, serta mengkaji keberlanjutan model kolaborasi dalam konteks kelembagaan yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, D. N., & Supriatna, D. (2025). Penertiban Anak Jalanan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Tatapamong*, 23–37. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v7i1.4689>
- Bianchi, C., Nasi, G., & Rivenbark, W. C. (2021). Implementing collaborative governance: models, experiences, and challenges. *Public Management Review*, 23(11), 1581–1589. <https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1878777>
- Child Protection Practitioners. (2024). *Accountability and Access to Services for Children in Humanitarian Contexts*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/cpp.1234>
- Connell, C. M., & Crowley, D. M. (Eds.). (2023). *Strengthening Child Safety and Well-Being Through Integrated Data Solutions*. Cham: Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-36608-6>
- Darmaji. (2022). *Implementasi Kebijakan*. *Ponek*. 1–18.
- Darmawan, E. (2023). Kota Semarang Raih Penghargaan KLA Kategori Utama dari Kementerian PPPA.

- Retrieved September 24, 2024, from 23/07/2023 website: <https://regional.kompas.com/read/2023/07/23/12265401/kota-semarang-raih-penghargaan-kla-kategori-utama-dari-kementerian-pppa>
- Hämäläinen, J., Pihlainen, K., & Vornanen, R. (2020). Sustainable Family Life and Child Welfare: A Conceptual Framework. *Sustainability*, 12(21), 9112. <https://doi.org/10.3390/su12219112>
- Hamdouch, A., & Nyseth, T. (2023). Can institutional innovation change the city? Theoretical landmarks and research perspectives. *Cities*, 137, 104287. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2023.104287>
- Idza, A. A. (2023). GELANDANGAN DAN PENGEMIS DALAM KONTEKS KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM. *Jurnal Tatapamong*, 145–161. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i2.3859>
- Jabareen, R., & Zlotnick, C. (2023). The personal, local and global influences on youth sexual behaviors in a traditional society. *Children and Youth Services Review*, 149, 106947. <https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2023.106947>
- Kydd, J. W. (2003). Preventing Child Maltreatment: An Integrated, Multisectoral Approach. *Health and Human Rights*, 6(2), 34. <https://doi.org/10.2307/4065429>
- Naeem, M., Ozuem, W., Howell, K., & Ranfagni, S. (2023). A Step-by-Step Process of Thematic Analysis to Develop a Conceptual Model in Qualitative Research. *International Journal of Qualitative Methods*, 22. <https://doi.org/10.1177/16094069231205789>
- National Conference of State Legislatures (NCSL). (2025). *Strengthening Families Through Housing Stability*. Retrieved from <https://www.ncsl.org/human-services/strengthening-families-through-housing-stability>
- Olawale, S. R., Chinagozi, O. G., & Joe, O. N. (2023). Exploratory Research Design in Management Science: A Review of Literature on Conduct and Application. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, VII(IV), 1384–1395. <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2023.7515>
- Olivier, G. D. and, & Thevenon. (2023). *Integrated policy making for child well-being*. <https://doi.org/10.1787/1a5202af-en>
- Pakpahan, K. et al. (2022). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kota Semarang Tahun 2002-2021*. 4(4), 59–70. Retrieved from <https://repofeb.undip.ac.id/11508/>
- Palmer, A. R., Labella, M., Plowman, E. J., Foster, R., & Masten, A. S. (2020). Parental emotion regulation strategies and parenting quality predict child internalizing symptoms in families experiencing homelessness. *Social Development*, 29(3), 732–749. <https://doi.org/10.1111/sode.12435>
- Rahmadanita, A., & Nurrahman, A. (2024). Analysis Of The

- Enforcement Of Regional Regulations On Public Order, Peace, And Community Protection In Bandung City. *Jurnal Tatapamong*, 172–187.
<https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v6i2.5041>
- Reventa Becedas, R., Sant Fruchtmann, C., Dincu, I., De Savigny, D., & Cobos Muñoz, D. (2022). Addressing the Evidence Gap in the Economic and Social Benefits of Civil Registration and Vital Statistics Systems: A Systematic Review. *Public Health Reviews*, 43.
<https://doi.org/10.3389/phrs.2022.1604560>
- Sulaiman, S., Abu Bakar Ah, S. H., Wahab, H. A., Jasni, M. A., & Amat Simin, M. H. (2024). Growing up on the Street: Barriers to Educational Services Among Street Children in Malaysia. *Journal of Social Service Research*, 1–14.
<https://doi.org/10.1080/01488376.2024.2348536>
- Syaiful, L. O. (2018). Collaborative Governance, Konsep dan aplikasi. In C. M. Sartono (Ed.), *Grup Penerbitan CV Budi Utama* (pertama). Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- T. L. S. McDonald, S. J. L. Smith, & J. K. S. J. (2023). *The challenge of implementation in complex, adaptive child welfare systems*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2023.106024>
- Tayo Isa, D. (2025). *How good housing ensures a good start for children and parents*. Retrieved from https://vanleerfoundation.org/wp-content/uploads/2025/05/Housing-2025-report-v4_pages.pdf
- Wulandari Asril, T. R. K. (2017). Strategi Penanganan Anak Jalanan di Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang. *Indonesia Journal, Indonesian*, 1–23.
- Wulczyn, F., Daro, D., Fluke, J., Feldman, S., Glodek, C., & Lifanda, K. (2024). *Adapting a Systems Approach to Child Protection: Key Concepts and Considerations*. Retrieved from https://www.socialserviceworkforce.org/wp-content/uploads/2024/03/Adapting_A_Systems_Approach_to_Child_Protection.pdf